

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dibuat setelah mendalami Permendagri No. 67 Tahun 2017 dan menganalisa data lapangan adalah:

1. Permendagri No 67 Tahun 2017 menjawab kebutuhan jalannya pemerintahan desa
2. Keadaan eksternal Permendagri No 67 Tahun 2017 memberi pengaruh besar terhadap implementasinya.

Berdasarkan data lapangan sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan mempengaruhi implementasinya, seperti dari aspek sosial ekonomi, aspek teknologi serta pengaruh pendampingan pejabat terkait di tingkat yang lebih tinggi.

3. Pejabat pelaksana Permendagri NO 67 Tahun 2017 tidak kreatif mencari alternatif pemecahan masalah ketika mendapat kendala pengimplementasiannya

Dalam data lapangan, tidak ditemukan adanya jalan keluar dari pejabat pelaksana (kepala desa terpilih) dan panitia, ketika menemukan kenyataan akan adanya sikap apatis dari masyarakat.

4. Sikap apatis masyarakat mengenai urusan pemerintah

Sikap apatis masyarakat merupakan akumulasi dari banyak faktor. Salah satunya adalah faktor sosial ekonomi masyarakat. Secara kritis menurut penulis, penyebab apatisisme masyarakat, selain karena faktor ekonomi juga karena budaya pemerintah yang dibangun pemerintah era sebelumnya, di mana Permendagri ini belum diterapkan, yakni pendekatan “*orang dekat*” yang menduduki posisi di aparat desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberi saran sebagai bentuk pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya memahami secara mendalam Permendagri No 67 Tahun 2017. Upaya ini tidak saja oleh pejabat pelaksana, tetapi juga oleh seluruh masyarakat
2. Dalam pengimplementasiannya, perlu mempertimbangkan situasi eksternal substansi Permendagri ini
3. Diperlukan kreativitas pejabat pelaksana (kepala desa terpilih dan panitia) dalam mencari pemecahan masalah ketika menghadapi kendala dalam implementasi.
4. Pejabat pelaksana, perlu menumbuhkan sikap peduli masyarakat terhadap urusan pemerintahan, karena pemerintahan yang baik akan memberi dampak positif terhadap pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baedhowi.2004. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- EdwardIII, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai PressInc, London-England.
- Goggin, Malcolm L. Et.al.1990 *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Keban, Yeremias T. 2007. *Pembangunan Birokrasi Di Indonesia*, pidato pengukuran Guru Besar pada FISIP UGM, Yogyakarta.
- Mazmanian, Daniela and Paula. Sabatier.1983.*Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Nakamura, Robert T. And Frank Small wood. 1980. *The Politic of Policy Implementation*, St.Martin Press, New York.
- Quade,E.S.1984.*AnalysisForPublicDecisions*,ElsevierSciencePublishers,NewYork.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy , secondedition*, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Sabatier,Paul.1986.“*Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research*” *Journal of Public Policy*6, (Jan), h.21-48.
- Sugiyono. 2012: *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2018: *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. dan R&D*. Bandung,

Alfabeta.

Wahab, Solichin A. 1991 .*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.

Wibawa, Samodra.1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta